

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Tentara Nasional Indonesia tidak memiliki kewenangan hukum publik dalam pengamanan Kejaksaan Republik Indonesia karena tidak adanya atribusi kewenangan yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang tentang TNI. Ketentuan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) hanya bersifat normatif dan tidak mengatur secara operasional pengamanan lembaga penegak hukum. Pelibatan TNI yang didasarkan pada Memorandum of Understanding (MoU) Nomor NK/6/IV/2023/TNI berada dalam rezim hukum perdata sehingga tidak dapat dijadikan sumber kewenangan publik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidak pastian hukum, sehingga diperlukan pengaturan khusus setingkat undang-undang yang secara tegas mengatur dasar, ruang lingkup, dan batasan pelibatan TNI guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, serta prinsip negara hukum dan supremasi sipil.
2. Dalam perspektif *siyasaḥ dusturiyyah*, pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan Kejaksaan Republik Indonesia dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīdziyyah*) yang bersifat amanah dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Dalam ketatanegaraan Islam, fungsi pertahanan dan keamanan berada di bawah

otoritas *ulil amri*, sedangkan penegakan keadilan harus dijalankan secara independen. Oleh karena itu, keterlibatan TNI hanya dapat dibenarkan sepanjang bersifat perbantuan (*ta'awun*), terbatas, dan tidak mengambil alih fungsi penegakan hukum. Pengamanan oleh TNI dimaknai sebagai upaya negara menciptakan kondisi yang aman dan kondusif agar Kejaksaan dapat menjalankan tugasnya secara independen dan profesional. Dengan demikian, pelibatan TNI harus dibatasi oleh ketentuan hukum yang jelas, menjunjung supremasi hukum, serta diarahkan untuk menjaga stabilitas dan kemaslahatan umum.

B. Saran

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai harmonisasi dan konsistensi pengaturan pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya terkait batas kewenangan dan mekanisme perbantuan dalam perspektif negara hukum dan supremasi sipil.
2. Penelitian selanjutnya juga diharapkan mengembangkan pendekatan empiris guna menilai efektivitas dan implikasi praktis pelibatan TNI terhadap independensi penegakan hukum serta hubungan antar lembaga negara, sehingga dapat memperkaya kajian normatif dengan temuan yang bersifat faktual dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, Fakhry dkk. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Aminuddin, M. Faishal. *Politik Mantan Serdadu Purnawirawan dalam Politik Indonesia 1998–2014*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Araf, Anton Aliabbas, et.al. *Peran Internal Militer: Problem Tugas Perbantuan TNI*. Jakarta: Imparsial, 2020.
- Awaludin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jawa Barat: Widina Media Utama, 2025.
- Bakrie, Connie Rahakundini, dan Nur Iman Subono. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Burhanuddin. *Pedoman Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU)*. Yogyakarta: Medpress, 2013.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- E, Zulfikar. *Sejarah Militer Indonesia: Mulai Kembalinya Tugas Tentara di Bidang Sipil Sejak Era Presiden Jokowi*. Jakarta: Tempo Publishing, 2021.
- Effendy, Muhadjir. *Profesionalisme Militer Profesionalisasi TNI*. Malang: UMM Press, 2025.
- Fattah, Abdoel. *Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945–2004*. Jakarta: LKiS, 2005.
- Hamzani, Achmad Irwan, dan Havis Aravik. *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2021.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.

Irsyadi Ramadhany, Muhammad. *Ilmu Perundang-Undangan: Gesetzgebungsverfahren, Gesetzgebungsmethode dan Gesetzgebungstechnik*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2025.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015.

Kusharyati, Indah, Akhmad Fauzi, dan Akhmad Haries Yulianto. *Sejarah Pemikiran Islam: Bidang Ilmu Teologi, Ilmu Kalam, Ilmu Filsafat, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, Politik Islam*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2025.

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktik Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Roswati Nurdin,dkk. *Pengantar Hukum Islam*. Jambi: PT Nawala Gama Education, 2025.

Pedrason, Rodon. *Buku Ajar Keamanan Nasional*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021.

Prihantoro, Mitro. *Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam Pengamanan Obyek Vital Nasional Strategis*. Jawa Barat: Widina Media.

Rohayatin, Titin. *Teori Pemerintahan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023.

Sarkawi, Saoki, dan Lailatul Qadariyah. *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Surabaya: CV Alfasyam Jaya Mandiri, 2025.

Soyusiawaty, Dewi, dan Ardiansyah. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2019.

Tampubolon, Ronald. *Operasi Militer Selain Perang di Indonesia dan Korea Selatan*. Purbalingga: Penerbit Nem, 2023.

Tim Kontras. *Politik Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia*.

Jakarta: Kontras, 2005.

Tohardi, Ahmad. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*. Pontianak: Tanjungpura University Press, 2019.

Widodo, Pujo, dkk. *Hubungan Sipil Militer dalam Penanggulangan Bencana*. Bandung: Indonesia Emas Group, 2024.

J.Suyuti Pulung. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

B. Jurnal

Azwar, Asrudin, and Mirza Jaka Suryana. "Dwifungsi TNI Dari Masa Ke Masa." *Jurnal Academia Praja* Vol.4, no. 1 (2021): 154–79.

Djuyandi, Yusa dkk. *Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional HUBUNGAN SIPIL DAN MILITER MELALUI DINAMIKA KUDETA MILITER DI THAILAND*. Vol. 2, 2023.

Kaihena, Gabriella, Audi H. Pondaag, dan Donna Setiabudhi. "Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." Vol. 11 No 2 (2023): 1–11.

Kamizi, Fajar. "Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah dan Relevansinya terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia." *Jurnal Hukum Ketatanegaraan* Vol 3, no. 1 (2025): 17–24.

Kariawan, I Made, Haerani, dan Sri Karyati. "Peran Tentara Nasional Indonesia dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia." *Unizar Recht Journal*, volume 1 nomor 4, (2022).

Khairiah, Umi, Ervina Sari Sipahutar, dan Irwansyah Tanjung. "Kepastian Hukum dalam Penetapan Kriteria Money Politik Menjelang Kampanye Pemilu 2024." *Jurnal Normatif* Vol.3, no. 2 (2023): 288–96.

Kusuma, Mahmud, Azhar Fauzie, dan Mustain Billah Marap. "Implikasi Konstitusional Wacana Pembentukan Angkatan Ke-

- Empat TNI dalam Perspektif Nilai dan Sila Pancasila serta Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Vol.7, no. 2 (2025): 1-10.
- Makmur, Andi Dadi Mashuri, dkk. "Amatan Hukum Perikatan Mengenai Otoritas Memorandum of Understanding (MoU) sebagai Tahapan Pra Kontrak." *LEGAL: Journal of Law* Vol.2, no. 2 (2023): 36-45.
- Rohman, M. Najibur. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 April 2020 (2021): 1-10.
- Pratama, Juwita Putri, Tyesta A.L.W. Lita, dan Sekar Anggun Gading Pinilih. "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* Vol.19, no. 4 (2022): 865-85.
- Quddus, Muh. Syah, dan Febri Muhammad Firdaus. "Dualisme Peran TNI: Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil dan Tata Kelola Pemerintahan?" *Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol.4, no. 4 (2025): 464-73.
- Suhenriko, Muhammad. "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen terhadap Perumusan Kebijakan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol.1, no. 2 (2023): 64-66.
- Tabina, Gadis. "Analisis Sistem Pengelolaan Arsip Inaktif di PT Prima Mitra Elektrindo." *Student Scientific Creativity Journal* 2, no. 1 (2023): 48-62.
- Wulandar, Astri, dan Zainuddin. "Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol.2, no. 2 (2021).
- Yosarie, Ikhsan, dan Meidi Kosandi. "Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi." *Indonesian Journal of Religion and Society* Vol.5, no. 2 (2023): 82-94.

Yumentti, Desi. "Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Integrasi* Vol.1, no. 1 (2023): 61-78..

Zulqornain, Kenken Muhammad, Muhammad Asro, dan Lutfi Fahrul Rizal. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Desa Sadar Hukum di Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta." *Jurnal Syari'ah & Hukum* Vol.6, no. 2 (2024): 189.

C. Skripsi

Adlan, Muhammad. "Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Antonio, Reza. Militeris Arse. "Peran Dan Kedudukan Tni Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 (Studi Kasus Pada KODIM 0620)," 2022.

D. Peraturan

Mou NK/6/IV/2023/TNI, N.D.

Tentara Nasional Indonesia. *Petunjuk Administrasi Pendidikan Prajurit TNI, No. 101.04-171005; Perintah Panglima TNI Nomor Perpang/S1/I/2008, 4 September 2008.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025). *Tentara Nasional Indonesia, N.D*